

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Bogor merupakan bukan merupakan daerah yang masuk kedalam penghitungan IHK di Jawa Barat, namun terkait perkembangan harga kebutuhan pokok dan penting setiap minggu dapat dilihat melalui rilis yang dikeluarkan oleh BPS yaitu IPH series. (Indeks Perkembangan Harga).

Ø Nilai IPH Januari Tahun 2026 yaitu M1 = -0.76. andil Cabai Merah(-0,6393), Cabai Rawit(-0,3294), Bawang Merah(-0,1919). M2 = -1.33 andil Cabai Merah(-0,7385), Cabai Rawit(-0,6554), Bawang Merah(-0,2989). M3 = -1.55 andil cabai merah(-0.7957), cabai rawit(-0.7613), bawang merah(-0.3281). M4 = -1.62 andil cabai rawit(-0,8203), cabai merah(-0,8202), bawang merah(-0,3462). Perkembangan Indeks Perubahan Harga (IPH) Kabupaten Bogor pada Januari 2026 menunjukkan tren deflasi yang semakin dalam, dari **-0,76 pada M1** menjadi **-1,33 (M2)**, **-1,55 (M3)**, hingga **-1,62 (M4)**. Deflasi ini secara konsisten didorong oleh kelompok komoditas hortikultura, khususnya **cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah**, dengan kontribusi yang terus meningkat setiap minggunya. Pada awal bulan, cabai merah menjadi penyumbang terbesar, namun pada akhir periode (M4), kontribusi deflasi terbesar berasal dari cabai rawit (-0,8203) yang hampir seimbang dengan cabai merah (-0,8202), diikuti bawang merah. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan kuatnya tekanan penurunan harga akibat peningkatan pasokan komoditas utama tersebut di pasar selama Januari 2026.

Ø Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan Januari 2026 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, hampir seluruh komoditas mengalami penurunan harga kecuali komoditas Beras Premium (Naik 0,02%), Gula Pasir (naik 0,17%), Bawang Putih (naik 1.47%), Daging sapi (naik 1.89%) dan jagung pipilan (naik 0.79%).

Ø Perkembangan IPH Kabupaten Bogor selama Februari menunjukkan tren kenaikan dari 1,28 (M1) menjadi 2,38 (M4), yang mencerminkan meningkatnya tekanan inflasi menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri (Rafi). Kenaikan ini didorong oleh komoditas utama seperti daging sapi yang konsisten dominan, serta cabai rawit yang andilnya terus meningkat, disertai pergeseran kontribusi ke daging ayam ras pada akhir periode. Kondisi ini menunjukkan kombinasi peningkatan permintaan masyarakat dan keterbatasan pasokan, yang menjadi karakteristik umum inflasi pada periode menjelang hari besar keagamaan.

Ø Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan Februari 2026 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, hampir seluruh komoditas mengalami kenaikan harga kecuali komoditas minyakita (turun 0.418%) dan tepung terigu (turun 0.76%)

Ø Perkembangan IPH Kabupaten Bogor pada bulan Maret menunjukkan kondisi inflasi yang relatif stabil dan terkendali, dengan nilai IPH sebesar 0,27 pada M1 dan sedikit meningkat menjadi 0,28 pada M2. Pada periode ini, yang bertepatan dengan menjelang dan mendekati puncak HBKN Idulfitri, tekanan inflasi tetap ada namun tidak mengalami lonjakan signifikan, didorong oleh komoditas daging ayam ras, cabai rawit, dan telur ayam ras dengan andil yang relatif sama. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan permintaan masyarakat menjelang Idulfitri, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi masih cukup terjaga sehingga mampu meredam gejolak harga. Dengan demikian, kondisi ini mencerminkan efektivitas upaya pengendalian inflasi daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan pada periode krusial menjelang hari besar keagamaan.

Ø Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kabupaten Bogor pada bulan Maret 2026 dari 11 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, hampir seluruh komoditas mengalami kenaikan harga kecuali komoditas Minyakita (turun 0.467%), cabe merah keriting (turun 2.24%), cabe rawit hijau (turun 1.58%), tepung terigu (turun 0.69%) dan jagung pipilan (turun 2.44%), sedangkan untuk komoditas gula pasir tidak mengalami perubahan harga.

Ø Secara keseluruhan, perkembangan inflasi di Kabupaten Bogor selama Januari hingga Maret 2026 menunjukkan pola **awal tahun yang terkendali, meningkat pada Februari, dan kembali stabil pada Maret**. Pada Januari, inflasi relatif rendah seiring dengan penurunan harga sebagian besar komoditas pangan, meskipun terdapat kenaikan terbatas pada beberapa komoditas seperti beras premium, gula pasir, bawang putih, daging sapi, dan jagung pipilan. Memasuki Februari, tekanan inflasi meningkat cukup signifikan yang tercermin dari kenaikan IPH, terutama didorong oleh komoditas pangan strategis seperti daging sapi dan cabai, meskipun secara umum harga komoditas yang dipantau masih didominasi tren penurunan. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan musiman menjelang HBKN Ramadan. Selanjutnya pada Maret, inflasi kembali menunjukkan stabilitas dengan kenaikan IPH yang sangat terbatas, meskipun berada pada periode menjelang Idulfitri, yang mengindikasikan bahwa pasokan dan distribusi pangan relatif terjaga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inflasi daerah selama triwulan I 2026 masih didominasi oleh kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dengan pola musiman, namun secara umum tetap dalam kondisi terkendali, didukung oleh stabilitas harga sebagian besar komoditas kebutuhan pokok.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

◦ **Ketergantungan pada komoditas volatile food**

Inflasi daerah masih didominasi oleh komoditas pangan bergejolak seperti cabai, daging, dan telur yang harganya sangat fluktuatif. Komoditas ini mudah terpengaruh oleh musim, cuaca, dan gangguan pasokan, sehingga sulit dikendalikan dan sering menjadi pemicu utama kenaikan inflasi.

◦ **Keterbatasan pasokan komoditas strategis**

Kenaikan harga daging sapi, cabai, dan ayam menunjukkan bahwa pasokan belum sepenuhnya mampu memenuhi lonjakan permintaan, terutama menjelang HBKN. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan produksi dan cadangan pangan.

◦ **Ketergantungan pasokan dari luar daerah**

Sebagian kebutuhan pangan Kabupaten Bogor masih dipasok dari daerah lain. Ketika terjadi gangguan distribusi atau produksi di daerah pemasok, maka harga di daerah ikut terdampak, sehingga stabilitas harga menjadi rentan

◦ **Distribusi dan logistik belum optimal**

Kendala dalam rantai distribusi seperti biaya transportasi, keterbatasan infrastruktur, atau keterlambatan pasokan dapat menyebabkan disparitas harga dan mempercepat kenaikan harga di tingkat konsumen.

◦ **Fluktuasi harga akibat faktor musiman dan cuaca**

Komoditas hortikultura seperti cabai sangat bergantung pada kondisi cuaca. Gangguan cuaca dapat menurunkan produksi dan memicu lonjakan harga secara tiba-tiba.

◦ **Belum meratanya efektivitas intervensi pemerintah**

Program seperti operasi pasar, sidak harga, dan subsidi belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah atau belum tepat waktu, sehingga dampaknya terhadap stabilisasi harga belum optimal.

◦ **Asimetri informasi harga dan potensi spekulasi**

Kurangnya transparansi informasi harga di tingkat produsen dan konsumen dapat dimanfaatkan oleh oknum pedagang untuk menaikkan harga secara tidak wajar, terutama saat permintaan meningkat.

◦ **Peningkatan permintaan saat HBKN (demand-pull inflation)**

Lonjakan konsumsi masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri meningkatkan tekanan permintaan terhadap bahan pangan, yang jika tidak diimbangi dengan pasokan memadai akan mendorong kenaikan harga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Keterjangkauan Harga:

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor secara berkala memantau harga barang kebutuhan pokok untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Pemantauan ini membantu mendeteksi fluktuasi harga sejak dini, sehingga langkah intervensi dapat dilakukan dengan cepat, seperti operasi pasar atau pembentukan cadangan pangan. Selain itu, informasi pasar yang akurat disampaikan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mencegah spekulasi. Dengan koordinasi yang lebih baik, pemantauan ini mendukung kebijakan yang efektif dan responsif dalam menjaga kestabilan harga di pasar. Pemantauan dan pasokan setiap hari melalui aplikasi SIDIRGA yang terintegrasi dengan SiLINDA Jawa Barat.
2. Pelaksanaan Bazaar murah Ramadhan selama bulan ramadhan di Kecamatan, Lapangan Tegar Beriman dan Stadion Pakansari
3. Operasi Pasar Rakyat Bersubsidi (OPADI) dalam rangka menyambut HBKN RaFi sebanyak 6.362 paket, yang terdiri dari komoditas beras premium, gula pasir, minyak goreng dan tepung terigu di Kecamatan Cibungbulang (3.362 paket) dan Kecamatan Citeureup (3.000 paket) yang dilaksanakan pada 14 Maret 2026.
4. Pemantauan harga di pasar rakyat dan retail modern sebanyak 3 kali terkait harga dan ketersediaan barang pokok penting (sidak pasar)
5. Melaksanakan Gelar Pangan Murah dengan komoditas beras SPHP, beras medium, beras premium, telur ayam, daging ayam ras, minyak goreng, gula pasir, cabe merah keriting, cabe rawit, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, daging sapi, cabe merah besar dan sayuran. Sampai bulan Maret 2026, Dinas Ketahanan telah melaksanakan sebanyak 88 kali Gelar Pangan Murah, dimana 69 kali sumber dana APBD kab Bogor dan 19 kali Mandiri. Pelaksanaan GPM tersebar di 40 Kecamatan dengan total omzet sebesar Rp 5.330.080.410,-
6. Memberikan subsidi transportasi melalui Fasilitas Distribusi Pangan sebanyak 88 kali sebesar 323.337 Kg/L dan Rp 1.028.806.000

Ketersediaan Pasokan:

1. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), dengan stok beras CPPD awal sebanyak 514.142,38 kg, yang sudah disalurkan 16.027,5 kg, sehingga stok CPPD yang tersisa sebanyak 498.114,88 kg

Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah berupa beras serta daging dan telur ayam.

3. Penambahan Luas Tambah Tanam (LTT) padi berhubungan langsung dengan ketersediaan pasokan beras, yang merupakan komoditas pangan utama di Kabupaten Bogor. Peningkatan LTT padi akan menambah jumlah produksi beras, sehingga pasokan beras di pasar lebih stabil dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada impor beras dan mencegah lonjakan harga beras yang dapat memicu inflasi pangan. Dengan pasokan beras yang lebih mencukupi, stabilitas harga pangan di Kabupaten Bogor dapat terjaga, mendukung pengendalian inflasi di daerah tersebut. Pada triwulan I, penambahan LTT Padi di Kabupaten adalah seluas 15.889,48 Ha. Pada bulan januari seluas 4.007,98 Ha, bulan februari seluas 5.105,65 Ha dan maret seluas 6.775,85 Ha yang (semua kecamatan ada tanam)
4. Penambahan luas panen padi berkontribusi langsung terhadap pengendalian inflasi melalui peningkatan ketersediaan pangan pokok, khususnya beras, yang merupakan komoditas dengan andil besar terhadap inflasi daerah. Dengan bertambahnya luas tanam dan panen, produksi padi meningkat sehingga pasokan beras di pasar menjadi lebih stabil dan mampu menahan tekanan harga saat permintaan naik. Ketersediaan pasokan yang memadai juga membantu menekan biaya distribusi karena ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah berkurang. Selain itu, peningkatan produksi lokal memungkinkan pemerintah daerah memiliki cadangan beras yang cukup untuk melakukan intervensi pasar, seperti operasi pasar dan kegiatan pangan murah, saat harga bergejolak. Secara keseluruhan, penambahan luas panen padi tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi secara berkelanjutan di tingkat daerah. Pada triwulan I, panen Padi di Kabupaten adalah seluas 27.041,92 Ha. Pada bulan januari seluas 9.193,87 Ha, bulan februari seluas 10.279,21 Ha dan maret seluas 7.568,84 Ha yang tersebar di 40 Kecamatan
5. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi pertanian dan perpipaan untuk lahan pertanian.

Kelancaran Distribusi :

1. Distribusi minyak goreng, minyakita di kegiatan Gelar Pangan Murah.
2. Distribusi beras petani lokal oleh BUMD Perumda Pasar Tohaga kepada ASN dalam program beras Carita Makmur.
3. Pembangunan infrastruktur program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) dan program lainnya.
- 2.

Komunikasi Efektif:

1. Melaksanakan rakord TPID bersama Kementerian Dalam Negeri sebanyak 14 kali;
2. Melaksanakan Rakord TPID bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 2 kali.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Aspek Ketersediaan Pasokan (Availability)

Upaya pengamanan pasokan melalui monitoring stok dan kerja sama antar daerah sudah berjalan cukup baik, terbukti dari stabilnya inflasi pada Maret. Namun, masih terdapat ketergantungan pada daerah pemasok sehingga rentan terhadap gangguan eksternal.

- Aspek Keterjangkauan Harga (Affordability)

Program operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah efektif dalam menahan lonjakan harga, tetapi pelaksanaannya belum merata dan belum sepenuhnya tepat waktu, terutama saat puncak kenaikan harga pada Februari.

- Aspek Kelancaran Distribusi (Distribution)

Koordinasi lintas sektor dalam menjaga distribusi sudah dilakukan, namun masih terdapat kendala logistik yang menyebabkan disparitas harga dan mempengaruhi harga di tingkat konsumen.

- Aspek Komunikasi Efektif (Communication)

Penyampaian informasi harga dan imbauan kepada masyarakat sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya mampu mengendalikan ekspektasi inflasi dan mencegah perilaku spekulatif di pasar.

- Ketepatan Waktu Intervensi

Kebijakan pengendalian inflasi masih cenderung bersifat reaktif, sehingga intervensi sering dilakukan setelah terjadi kenaikan harga, bukan sebagai langkah antisipatif.

- Pemerataan Pelaksanaan Program

Implementasi program pengendalian inflasi belum menjangkau seluruh wilayah secara merata,

sehingga efektivitasnya masih berbeda antar wilayah.

- Fokus pada Komoditas Strategis

Pengendalian inflasi masih terkonsentrasi pada komoditas utama seperti daging dan cabai, namun perlu penguatan pengendalian pada komoditas lain yang berpotensi memicu inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- **Penguatan Pasokan dan Cadangan Pangan Daerah (Supply Management Berkelanjutan)**

Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengamanan pasokan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Selain memperluas kerja sama antar daerah (KAD) dengan sentra produksi utama, perlu dilakukan kontrak pasokan jangka menengah untuk komoditas strategis seperti daging sapi, ayam, dan cabai. Optimalisasi peran BUMD pangan menjadi kunci sebagai offtaker sekaligus stabilisator harga, termasuk dalam pengelolaan cadangan pangan daerah (buffer stock) yang dapat dilepas saat terjadi gejolak harga. Dengan demikian, pemerintah memiliki instrumen nyata untuk mengintervensi pasar secara cepat dan terukur.

- **Intervensi Harga yang Antisipatif Berbasis Data (Early Warning System)**

Pengendalian inflasi harus bertransformasi dari pola reaktif menjadi antisipatif melalui pemanfaatan data harga harian dan mingguan (IPH). Diperlukan sistem **early warning** yang mampu mendeteksi potensi kenaikan harga lebih dini, sehingga operasi pasar, subsidi ongkos angkut, maupun Gerakan Pangan Murah dapat dilakukan sebelum harga melonjak. Selain itu, penentuan waktu, lokasi, dan komoditas intervensi harus berbasis analisis spasial (wilayah rawan inflasi) agar kebijakan lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan.

- **Reformasi Rantai Distribusi dan Efisiensi Logistik**

Salah satu akar masalah inflasi daerah adalah panjangnya rantai distribusi dan tingginya biaya logistik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyederhanaan jalur distribusi melalui penguatan konektivitas antara produsen-distributor-pasar, termasuk pemanfaatan teknologi digital (platform distribusi pangan). Pemerintah juga perlu memastikan kelancaran transportasi, khususnya pada periode krusial seperti HBKN, serta memperketat pengawasan terhadap praktik penimbunan dan kartel. Intervensi seperti subsidi transportasi atau fasilitasi distribusi langsung dari produsen ke pasar rakyat dapat menekan disparitas harga.

- **Penguatan Produksi Lokal dan Substitusi Pasokan**

Dalam jangka menengah dan panjang, stabilitas harga sangat bergantung pada kemandirian produksi daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan produksi lokal melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi, khususnya untuk komoditas penyumbang inflasi. Dukungan dapat berupa penyediaan benih unggul, pupuk, akses pembiayaan (KUR sektor pertanian/peternakan), serta penerapan teknologi pertanian modern (smart farming). Selain itu, perlu didorong diversifikasi pangan dan substitusi komoditas agar tekanan permintaan tidak terpusat pada satu jenis komoditas tertentu.

Digitalisasi Informasi Harga dan Penguatan Kelembagaan TPID

Transparansi harga melalui sistem informasi digital yang real-time menjadi instrumen penting dalam menekan asimetri informasi dan ekspektasi inflasi. Masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses harga acuan sehingga meminimalisir praktik spekulatif. Di sisi lain, TPID perlu diperkuat tidak hanya sebagai forum koordinasi, tetapi juga sebagai pusat analisis kebijakan berbasis data (data-driven policy). Rapat koordinasi rutin harus dilengkapi dengan dashboard analisis inflasi, proyeksi risiko, dan skenario kebijakan, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, presisi, dan adaptif terhadap dinamika pasar, terutama menjelang HBKN dan periode rawan inflasi lainnya.